

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nomor SOP	000.8.3.3 / /SATPOLPP-A
	Tanggal Pembuatan	2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	2023
	Disahkan Oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  SUHERMAN, S.H., M.H. NIP.19701110 200212 1 005
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	NAMA SOP	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran oleh pejabat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3 Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).	Memahami tentang Prosedur Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau pelanggaran oleh Pejabat	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
SOP Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.	1. Surat Pengaduan berserta bukti-bukti 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Perangkat keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika penjatuhan hukuman disiplin PNS tidak dilakukan maka atasan langsung dapat diberikan sanksi hukuman disiplin karena tidak ada upaya peringatan atau pembinaan bawahan	Dokumen Pengaduan	

SOP PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pengadu	Subbagian Umpar	Sekretaris	BKD Prov Kalbar	Kasat Poi PP Prov Kalabar	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan pengaduan lewat Subbagian Umpar						Bukti-Bukti Pelanggaran	1 hari	Bukti-Bukti Pelanggaran	
2	Pengaduan diterima/ditolak Subbagian Umpar						Bukti-bukti pelanggaran dan Peraturan Perundang-undangan	2 hari	Bukti-bukti pelanggaran dan Peraturan Perundang-undangan	
3	Ajuan Pengaduan ke Sekretaris Satpol PP Prov Kalbar						Bukti-bukti pelanggaran dan Peraturan perundang-undangan	1 hari	Surat pengantar, Bukti-bukti pelanggaran dan Peraturan Perundang-undangan	
4	Penanganan Pengaduan di BKD Prov Kalbar						Surat pengantar, Bukti-bukti pelanggaran dan Peraturan Perundang-undangan	7 hari	SK Teguran Lisan, Teguran Tertulis atau Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
5	Penetapan Sanksi/Pembebasan Sanksi Kepegawaian						Surat pengantar, bukti-bukti pelanggaran dan Berita Acara Pemeriksaan	1 hari		